

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi dan. 1985. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN UI Sinar Bakti
- Gultom. 2016. *Kualitas Keputusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*. Jakarta: Suara Pembaruan
- A, Syamsudin. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Latif, Abdul. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Medai
- M.Y., Benny. 1980. *Intisari Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Basah, Sjachran. 1985. *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Manao, Disiplin. F. 2017. *Penyalahgunaan Wewenang pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Kreasi Sahabat Bersama
- Elpah, Dani, dkk. 2016. *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*, Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil MA RI
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT. Refika Aditrama
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Saidi, Muhammad Djafar. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bohari. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Makassar: Tanpa Penerbit

- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Schwartz, Bernanrd. 2006. *Frech Administrative Law and The Common-Law World*. Jakarta: Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.
- Adji, Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Kantor Pengacara Konsultan Hukum
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, edisi revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Kisi-Kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- M.W. Kusumah. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Darul, Chatarina dan Dessy Marliani. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Danil, H. Elwi. 2011. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Padang: PT. Rajagrafinso Persada
- Hidayat, Herman dan Harry Z. Soeratin dalam Marisi Butar-Butar. 2012. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Khususnya Prinsip Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BUMN Perkebunan: Studi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)*. Medan: Media Mandiri

#### **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen ketiga). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, 1959.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LL Sekretariat Negara Nomor 140. Jakarta

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. LL Sekretariat Negara Nomor 70. Jakarta

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. LL Sekretariat Negara Nomor 106. Jakarta

Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. LL Sekretariat Kabupaten Nomor 108. Jakarta.

#### **JURNAL/ ARTIKEL/ KARYA ILMIAH LAINNYA**

Erliyana, Anna. 2004. “Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Kurun Waktu 1977-1998 Tinjauan Asas Larangan Melampaui Wewenang”.  
*Disertasi*

Hadjon, Philipus M. “Tentang Wewenang”. *Makalah Universitas Airlangga*  
Varia Peradilan Tahun XXX Nomor 353 (April, 2015)

Indroharto. 1994. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Paulus Effendi Lotulung”. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hadjon, Philipus M. 1997. “Tentang Wewenang”. *Jurnal Yuridika*, (Sptember-Desember, Nomor 5&6, tahun XII)

Dewi, Arma. 2019. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Persepektif Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, no.1, vol.1.

Syam, Fauzi. 2019. “Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai negeri Sipil di Peradilan Administrasi”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, no. 1, vol. 1.

Susanto. 2019. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”. *Administrative Law and Governance Journal*, no. 2, vol. 1

- Darda Pasmatuti, 2019. “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*, no. 1, vol. 1. Jakarta: Lembaga Penelitian dan penerbitan Hasil Penelitian
- Purwoleksono, Didik Endro. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press
- Shah, Anwar (ed). 2007. *Public Sector Governance and Accountability Series- Performance Accountability and Combating Corruption*. Washington DC: The World Bank (terjemahan)
- Sudirman, Florentinus.
- Sudirman, Florentinus. 2017. “Mencegah Korupsi di Daerah dengan Pengawasan oleh Kejati.” *Jurnal Legalitas*, no.1, vol. 2. Samarinda: Universitas 1945 Samarinda
- Fahmiron. 2016. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemenuhan Perlindungan Anak”. *Disertasi*
- Karisma, dkk. 2021. “Pengaruh Privatisasi Dalam Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Jurnal Caraka Prabhu*, no. 2, vol. 5 (Desember)
- Ikhwansyah, Isis dkk. 2018. “Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. *Jurnal Media Hukum*, no. 2, vol. 2 (Desember)

#### **INTERNET DAN LAINNYA**

- Definisi pengujian, diakses dari [www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-pengujian-pada-tanggal-29-oktober-2022](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-pengujian-pada-tanggal-29-oktober-2022)
- Siaran Pers Nomor PR-119/S.MBU.B/08/2022 Tentang Peran BUMN dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Triwulan II 2022 yang diakses pada [https://bumn.go.id/media/press-conference/peran-bumn-dalam-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-nasional-di-tw-ii-2022-4j\\_pada-26-Desember-2022](https://bumn.go.id/media/press-conference/peran-bumn-dalam-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-nasional-di-tw-ii-2022-4j_pada-26-Desember-2022)
- Harsono, “Kerjasama antara Perusahaan Negara, Swasta dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Pembangunan Ekonomi di Indonesia”, *Pidato*

*Pengukuhan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Universitas Brawijaya*, (Malang, 1986)

Klaster industri BUMN yang diakses melalui <https://bumn.go.id/portfolio/cluster> pada 26 Desember 2022

Penjelasan Tentang Perum PPD yang diakses pada <http://www.perumppd.co.id/> diakses pada 26 Desember 2022

Samsul Ramli, Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara?, dipublikasi pada 21 Februari 2018, diakses dari <https://samsulramli.net/2018/02/21/kerugian-negara-atau-kerugian-keuangan-negara/> pada 16 Juli 2022

Resume Berkas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Pusat Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta Tahun 2009-2010.

